



## Implementasi Ekonomi Syariah dalam Administrasi Pembangunan di Indonesia pada Era Transformasi Digitalisasi

Hanif Ibrahim<sup>1\*</sup>, Moh Mukhsin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia  
[5554220035@untirta.ac.id](mailto:5554220035@untirta.ac.id)<sup>1\*</sup>, [moh.mukhsin@untirta.ac.id](mailto:moh.mukhsin@untirta.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat: Jalan Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163

Korespondensi penulis: [5554220035@untirta.ac.id](mailto:5554220035@untirta.ac.id)

**Abstract:** *The implementation of Islamic economics in Indonesia's development administration during the digital era presents a significant opportunity to build a system founded on inclusivity, fairness, and sustainability. Digital transformation plays a pivotal role in optimizing sharia-based financial technologies, empowering community economies, and enhancing resource management efficiency. Technologies such as halal e-commerce, blockchain, and sharia-compliant financial applications extend access to financial services in previously underserved remote areas. However, challenges such as low digital literacy levels and insufficient regulatory frameworks remain obstacles. Collaboration among the government, Islamic financial institutions, businesses, and communities is essential to ensure the effective implementation of this system. By combining sharia principles with technological innovations, Islamic economics holds substantial potential to boost Indonesia's economic competitiveness on a global scale.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Development Administration, Digital Transformation*

**Abstrak:** Implementasi ekonomi syariah dalam administrasi pembangunan di Indonesia pada era digital memberikan peluang besar untuk menciptakan sistem yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Transformasi digital berperan penting dalam mendukung optimalisasi teknologi berbasis syariah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan. Teknologi seperti e-commerce halal, blockchain, dan aplikasi keuangan berbasis syariah membuka akses layanan keuangan ke wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, tantangan seperti tingkat literasi digital yang rendah dan kerangka regulasi yang belum memadai masih perlu diatasi. Kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku bisnis, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi ini. Dengan memadukan prinsip syariah dan inovasi digital, ekonomi syariah berpotensi besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara global.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Administrasi Pembangunan, Transformasi Digital

### 1. LATAR BELAKANG

Kegiatan perekonomian adalah kegiatan yang dilakukan oleh tiap – tiap individu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang tidak terbatas. Kegiatan perekonomian sendiri telah dilakukan bahkan sejak jaman kerajaan yang dimulai dengan transaksi menukar barang dengan barang hingga mengalami perubahan menjadi menggunakan uang untuk melakukan transaksi. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, perkembangan perekonomian kian juga mengalami perkembangan. Bahkan kini, alat transaksi uang dapat berupa digital ataupun berupa kartu sehingga semakin memudahkan kegiatan transaksi.

Dengan kemudahan transaksi yang ada, menimbulkan sifat konsumtif masyarakat dan meningkatkan daya beli pada masyarakat di Indonesia. Tentu saja dengan adanya peristiwa

tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1** pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Tahun	Persen
2019	5,05
2020	-5,32
2021	7,07

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan data tersebut diketahui pada tahun 2020 telah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia namun pada satu tahun kemudian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia cepat pulih dan bangkit sehingga mampu melebihi persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dapat bergerak tumbuh dengan cepat.

Dengan gerak pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, tentu saja perlu adanya pengelolaan dan perencanaan keuangan yang tepat. Perencanaan keuangan menurut definisi Financial Planning Standards Board Indonesia merupakan kegiatan yang dilakukan demi tercapainya suatu tujuan dengan melakukan pengelolaan keuangan secara terencana dan teratur. Dengan dilakukannya pengelolaan keuangan tentu saja bertujuan agar memiliki rincian perencanaan keuangan yang tepat dan juga bertujuan agar mampu menyimpan uang untuk kebutuhan di masa depan serta tidak melakukan transaksi yang tidak diperlukan ataupun menghamburkan uang untuk keperluan yang tidak penting. Segala kalangan masyarakat dapat mempelajari dan melakukan pengelolaan atau perencanaan keuangan agar memiliki perekonomian yang sehat apalagi pada era transformasi digitalisasi seperti saat ini.

Era transformasi digitalisasi telah membawa banyak perubahan positif yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun, di sisi lain, era ini juga menghadirkan tantangan baru yang signifikan bagi kehidupan manusia di berbagai sektor. Tantangan-tantangan tersebut mencakup ranah politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, serta perkembangan teknologi informasi itu sendiri (Setiawan, 2017). Kemajuan teknologi digital yang pesat telah mentransformasi dunia secara mendalam, ditandai dengan lahirnya inovasi-inovasi baru yang mempermudah akses informasi dan memberikan manfaat teknologi yang dapat dinikmati secara luas, baik secara bebas maupun terkendali. Dalam konteks globalisasi, digitalisasi telah menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat dihindari. Salah satu langkah strategis untuk mengadaptasi perubahan ini adalah dengan mengembangkan ekonomi digital sebagai pilar utama transformasi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital turut didorong oleh perubahan perilaku masyarakat yang semakin terbiasa

menggunakan platform digital di berbagai sektor industri (Alfiani et al., 2022). Fenomena ini mencerminkan dinamika besar dalam lingkungan global akibat kemajuan teknologi dan informasi, serta meningkatnya ketergantungan antarnegara yang melampaui batas geografis.

Kemajuan teknologi digital memberikan kemudahan dalam berbagi informasi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi secara lebih efisien. Penggunaan teknologi ini telah menghasilkan aplikasi-aplikasi inovatif yang mendukung efisiensi waktu, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Misalnya, sistem manajemen informasi yang terintegrasi, pembayaran elektronik yang cepat, hingga metode pendidikan yang lebih interaktif (Ardiansyah, 2023). Kehadiran teknologi digital juga mengubah pola konsumsi masyarakat, seperti dalam aktivitas berbelanja, hiburan, dan pekerjaan. Dengan adanya e-commerce, konsumen dapat membeli barang secara online dari berbagai tempat tanpa harus bepergian (Prasetyo, 2023). Transformasi signifikan yang dibawa oleh era digital juga terlihat dalam sektor ekonomi. Revolusi digital tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga membawa dampak besar terhadap tatanan sistem keuangan global. Teknologi seperti internet, ponsel pintar, blockchain, dan kecerdasan buatan membuka peluang sekaligus tantangan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Di sisi lain, kemajuan ini meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan berbasis syariah. Melalui platform digital seperti aplikasi seluler dan situs web, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses informasi tentang layanan perbankan syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah. Selain itu, transaksi berbasis prinsip syariah kini dapat dilakukan secara online, mempermudah individu maupun pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (K.K. & Maharani, 2024).

Lebih lanjut, dalam era transformasi digitalisasi yang terus berkembang, penerapan ekonomi syariah memainkan peranan strategis dalam mendukung administrasi pembangunan nasional di Indonesia. Ekonomi syariah bukan hanya sekadar alternatif sistem ekonomi, tetapi juga merupakan elemen fundamental dalam menciptakan stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. Berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menitikberatkan pada keseimbangan dan kesejahteraan, ekonomi ini semakin relevan diintegrasikan dalam berbagai sektor pembangunan untuk menghadapi tantangan era transformasi digital. Transformasi digitalisasi memberikan peluang besar bagi implementasi ekonomi syariah dalam administrasi pembangunan, baik melalui optimalisasi teknologi keuangan berbasis syariah, penguatan ekonomi masyarakat, hingga inovasi digital yang mendukung efisiensi dan transparansi. Teknologi seperti aplikasi keuangan syariah, e-commerce halal, dan blockchain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tata kelola sumber daya pembangunan yang lebih akuntabel

dan inklusif. Kehadiran layanan keuangan syariah berbasis digital juga memperluas akses terhadap inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan konvensional.

Salah satu wujud nyata integrasi ekonomi syariah dalam pembangunan nasional adalah penggunaan instrumen keuangan syariah seperti sukuk untuk pembiayaan infrastruktur. Sukuk tidak hanya menjadi sumber pendanaan yang stabil, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan memanfaatkan teknologi digital, penerbitan dan distribusi sukuk dapat dilakukan secara daring, sehingga lebih efisien dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Selain itu, sektor UMKM yang menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia juga mendapat manfaat signifikan dari pendekatan ekonomi syariah berbasis digital. Kehadiran platform pembiayaan syariah yang dirancang khusus untuk UMKM dapat memberikan akses pendanaan yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang mendukung pemerataan kesejahteraan. Namun, penerapan ekonomi syariah dalam era digitalisasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah rendahnya literasi digital dan literasi ekonomi syariah di masyarakat, serta kebutuhan akan kebijakan dan regulasi yang adaptif untuk mendukung integrasi ini. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi hambatan tersebut dan memastikan implementasi yang efektif.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti teks, dokumen, gambar, atau video, untuk memahami fenomena atau menjawab permasalahan tertentu secara mendalam (Creswell, 2010). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu salah satu metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis literatur terkait suatu topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Metode studi literatur dipilih karena memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi yang berbentuk dokumen, baik berupa buku, artikel, majalah, hingga catatan sejarah, baik yang tersedia di perpustakaan fisik maupun secara daring (Mardalis, 1999 dalam Mirzaqon & Purwoko, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan studi literatur digunakan untuk menganalisis artikel dengan judul, "Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Administrasi Pembangunan Di Indonesia Pada Era Transformasi Digitalisasi." Pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada berbagai artikel ilmiah, jurnal, dan sumber

literatur lain yang relevan yang tersedia secara online. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang kaya dan mendalam guna menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah, atau yang juga dikenal sebagai ekonomi Islam, memiliki beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ahli. Menurut M.A. Manan dalam Kholid (2018), ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari berbagai persoalan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Definisi ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip Islam menjadi dasar utama dalam memahami dan menyelesaikan isu-isu ekonomi yang muncul dalam kehidupan sosial. Muhammad Abdullah al-'Arabi dalam Wulandari (2023) mendefinisikan ekonomi syariah sebagai seperangkat prinsip dasar ekonomi yang dirumuskan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam membangun sistem perekonomian yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks waktu dan lingkungan di mana ia diterapkan. Sementara itu, Prof. Dr. Zainuddin Ali (2008) mengartikan ekonomi syariah sebagai kumpulan kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek perekonomian umat manusia. Pendekatan ini menitikberatkan pada regulasi dan panduan hukum syariah dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Lebih lanjut, menurut Dr. Mardani dalam Febriyani (2020), ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun non-komersial berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Definisi ini menyoroti aspek praktis dari aktivitas ekonomi yang tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan wahyu transendental, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta penafsiran rasional melalui ijtihad. Sistem ini mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika Islam dalam setiap aspek perekonomian, menjadikannya sebagai panduan holistik untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat secara berkelanjutan.

#### **Pengertian Administrasi Pembangunan**

Administrasi pembangunan memiliki beragam makna yang dirumuskan oleh para ahli, masing-masing menawarkan sudut pandang yang memperkaya konsep ini. Sondang P. Siagian (1983) mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai keseluruhan upaya kolektif yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dalam berbagai dimensi

kehidupan guna mencapai tujuan bersama. Definisi ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memperbaiki kondisi bangsa secara menyeluruh. Bintoro Tjokroamidjojo (1997) menekankan aspek dinamis dan inovatif dari administrasi pembangunan. Menurutnya, administrasi pembangunan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, guna menghasilkan perubahan positif dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Perspektif ini menyoroti pentingnya perencanaan dan pengelolaan strategis dalam pembangunan. Lebih lanjut, Ginandjar Kartasasmita (1997) memandang administrasi pembangunan sebagai bidang kajian yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kinerja sistem administrasi negara, khususnya di negara-negara berkembang. Menurutnya, administrasi pembangunan mencakup tidak hanya proses pengelolaan pembangunan, tetapi juga upaya untuk memperkuat struktur administrasi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini memerlukan penerapan nilai-nilai dasar birokrasi, seperti kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas, sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas.

Pendapat lain dikemukakan oleh Fred W. Riggs (1994) memberikan pandangan yang lebih holistik dengan mengidentifikasi dua aspek utama dalam administrasi pembangunan. Pertama, ia mengaitkan administrasi pembangunan dengan mekanisme pelaksanaan program pembangunan, termasuk cara pemerintah dan organisasi mengimplementasikan kebijakan serta kegiatan yang telah direncanakan. Kedua, ia menyoroti dampak dari administrasi pembangunan, seperti penguatan kapasitas administrasi publik dan transformasi sosial-politik yang dihasilkan dari keberhasilan program pembangunan. Riggs menegaskan bahwa keberhasilan administrasi pembangunan dapat menciptakan efek domino yang memperkuat struktur masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, administrasi pembangunan adalah proses yang kompleks dan multidimensional yang bertujuan untuk mengelola dan memfasilitasi pembangunan melalui pengoptimalan sumber daya, inovasi strategis, peningkatan kapasitas administratif, serta partisipasi masyarakat yang inklusif. Dengan pendekatan ini, administrasi pembangunan diharapkan mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat daya saing bangsa di kancah internasional.

### **Pengertian Transformasi Digital**

Transformasi digital adalah proses perubahan besar yang dialami oleh organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengintegrasikan berbagai aspek operasional bisnis. Proses ini melibatkan pergeseran dari metode bisnis tradisional ke pendekatan berbasis digital, mengotomatisasi proses kerja untuk meningkatkan efisiensi, serta menciptakan produk dan layanan yang lebih inovatif. Transformasi ini juga membuka peluang

untuk mempererat interaksi dengan pelanggan, membangun budaya kerja yang lebih fleksibel, serta mendorong inovasi dalam organisasi. Dengan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, analitik big data, dan komputasi awan, perusahaan dapat mengelola data secara optimal guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis dan akurat. Meskipun menawarkan berbagai manfaat, transformasi digital memerlukan perencanaan yang menyeluruh, pengelolaan risiko yang efektif, serta kesiapan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan.

Lebih lanjut, beragam faktor utama yang mendorong transformasi digital antara lain kemajuan pesat dalam teknologi, perubahan ekspektasi konsumen, intensitas persaingan pasar, serta regulasi yang mendorong penerapan teknologi digital. Selain itu, keterbatasan sistem manual dan tekanan pasar menjadi alasan penting bagi organisasi untuk beralih ke solusi berbasis digital. Dalam menjalankan transformasi digital, terdapat beberapa langkah strategis yang harus diperhatikan, seperti memastikan kesiapan infrastruktur teknologi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta menyusun strategi implementasi yang menyeluruh. Pendekatan ini penting untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat dari proses transformasi, sehingga organisasi dapat tetap relevan, kompetitif, dan berkelanjutan di era digital.

### **Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Administrasi Pembangunan Di Indonesia Pada Era Transformasi Digitalisasi**

Digitalisasi ekonomi syariah merujuk pada penerapan teknologi digital dalam sistem ekonomi yang berbasis prinsip syariah. Di era digital, sektor-sektor seperti e-commerce, e-business, e-banking, e-payment, e-marketing, dan e-learning memungkinkan terjadinya transaksi dan interaksi secara global di dunia maya. Dalam konteks ini, pengetahuan menjadi aset yang sangat penting bagi perusahaan. Dulu, aset utama perusahaan adalah tanah, gedung, dan tenaga kerja, tetapi sekarang pengetahuan kolektif yang dimiliki oleh sumber daya manusia menjadi kunci kesuksesan. Seorang individu maupun organisasi yang mampu mengelola dan memanfaatkan pengetahuan ini, baik melalui sistem manajemen pengetahuan maupun teknologi kecerdasan buatan (AI), memiliki peluang lebih besar untuk bersaing. Selain itu, digitalisasi telah mengubah cara kita mengelola informasi, dengan mengonversi data menjadi format digital yang memudahkan penyimpanan dan pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Hal ini mendukung perkembangan produk dan jasa yang dapat diakses di seluruh dunia melalui platform digital, seperti cloud storage dan internet banking. Sementara itu, virtualisasi memungkinkan bisnis dijalankan tanpa memerlukan aset fisik besar, hanya dengan perangkat sederhana dan koneksi internet. Dalam lingkungan ini, perusahaan dapat beroperasi secara

online 24 jam sehari, memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar global tanpa batas waktu atau ruang. Selain itu, konsep molekulasi menggambarkan fleksibilitas organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan pasar global yang semakin kompetitif. Organisasi yang sukses adalah yang mampu beradaptasi dengan cepat, seperti yang dikatakan oleh Charles Darwin, bahwa yang bertahan bukan yang terbesar atau terkuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi. Semua faktor ini menjadikan digitalisasi sebagai elemen penting dalam membentuk ekonomi syariah yang lebih efisien dan terhubung secara global.

Transformasi digital telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan ekonomi syariah. Dalam konteks ini, teknologi menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam dunia bisnis dan transaksi keuangan. Contohnya, aplikasi digital seperti Go-Jek telah menerapkan prinsip syariah melalui kontrak mudharabah dan musyarakah, di mana mekanisme bagi hasil diterapkan di antara para pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan bagaimana teknologi modern dapat berperan sebagai penggerak untuk mewujudkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam praktik bisnis sehari-hari. Selain itu, transformasi digital membuka peluang lebih luas untuk inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Di sektor perbankan, implementasi nilai-nilai hukum ekonomi Islam juga menjadi prioritas utama. Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya, berupaya konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi perbankannya, seperti murabahah dan akad jual beli. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pegawai dan nasabah terhadap prinsip-prinsip ini masih memerlukan peningkatan. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi krusial untuk memastikan penerapan nilai-nilai syariah yang sesuai dan adil dalam setiap transaksi. Hal ini juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah sebagai bagian dari administrasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada sisi lain, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dalam ekonomi syariah memegang peranan penting, khususnya dalam sektor pembiayaan. BSI di Provinsi Lampung, misalnya, telah menerapkan mekanisme pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus meminimalkan risiko kerugian. Penerapan ini menegaskan bahwa integrasi manajemen risiko dalam administrasi pembangunan berbasis syariah tidak hanya membantu memastikan keberlanjutan tetapi juga memberikan jaminan keamanan bagi nasabah dan pelaku usaha. Konsep keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dalam administrasi pembangunan yang berbasis syariah, terutama

melalui penerapan green banking. Bank-bank syariah, termasuk BSI, mulai berkomitmen untuk mendukung pembiayaan ramah lingkungan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan tetapi juga menjadi daya tarik bagi nasabah yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu ekologi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik ekonomi syariah, sektor keuangan Islam dapat berperan aktif dalam menciptakan pembangunan yang holistik.

Adopsi teknologi juga menjadi kunci dalam mengembangkan produk keuangan syariah, khususnya untuk menjangkau generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi digital. BSI, misalnya, berhasil menarik perhatian segmen ini melalui peluncuran produk-produk inovatif berbasis teknologi, seperti aplikasi perbankan digital yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah. Peningkatan penggunaan teknologi tidak hanya mempermudah akses ke layanan keuangan tetapi juga memperluas inklusi ekonomi syariah, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap administrasi pembangunan nasional. Dalam konteks administrasi pembangunan di Indonesia, penerapan ekonomi syariah berbasis digitalisasi merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan global dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Transformasi digital memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, penyediaan layanan publik yang lebih baik, serta mendorong inovasi dalam sektor keuangan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam setiap aspek administrasi pembangunan, Indonesia dapat membangun sistem yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di era digital.

Implementasi ekonomi syariah dalam administrasi pembangunan di Indonesia di tengah era digitalisasi menawarkan solusi strategis untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Dengan prinsip-prinsip utama seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan, ekonomi syariah menjadi fondasi dalam menciptakan sistem pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Pemanfaatan instrumen seperti zakat, wakaf, dan infaq dapat dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya melalui pengumpulan dan distribusi dana sosial yang lebih efektif. Di sisi lain, digitalisasi membuka peluang besar dalam memfasilitasi penerapan ekonomi syariah, misalnya melalui platform fintech berbasis syariah, marketplace halal, serta aplikasi untuk pengelolaan zakat dan wakaf. Teknologi ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pembangunan. Kendati demikian, tantangan seperti literasi digital yang belum merata, regulasi yang masih berkembang, serta keamanan data menjadi hambatan yang harus diatasi. Dalam menghadapinya, pemerintah perlu menjalin sinergi dengan lembaga keuangan syariah, pelaku industri teknologi, serta masyarakat

luas. Dengan pendekatan kolaboratif ini, penerapan ekonomi syariah berbasis digital dapat berkontribusi secara signifikan pada terciptanya pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif, adil, dan berdaya saing tinggi.

#### **4. KESIMPULAN**

Integrasi ekonomi syariah dalam administrasi pembangunan di Indonesia pada era digitalisasi menghadirkan peluang besar untuk menciptakan sistem yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, ekonomi syariah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, memperluas akses keuangan, dan memperkuat peran masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. Inovasi seperti platform digital berbasis syariah, pembiayaan berwawasan lingkungan, serta layanan perbankan digital menunjukkan kontribusi nyata ekonomi syariah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital dan kebutuhan akan regulasi yang fleksibel, penggabungan nilai-nilai syariah dengan teknologi digital menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

#### **Saran**

Agar implementasi ekonomi syariah di era digitalisasi dapat berjalan sukses, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah diharapkan menyusun kebijakan yang responsif dan mendukung, sementara lembaga keuangan syariah perlu terus berinovasi menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Upaya peningkatan literasi ekonomi syariah dan keterampilan digital masyarakat harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah terpencil, harus menjadi prioritas agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata. Integrasi antara ekonomi syariah dan digitalisasi hendaknya diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, A., Syasmita, T., & Apriyanti, R. (2023). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Prosenama*, 3, 297-307.
- Amullah, O.I., Wijaya, G., Sayidina, I.M., Fanani, A.A., Adawiyah, S.R., Tanjung, L., & Huda, B. (2023). Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018: Studi Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*.
- Anita, A., Hanif, H., & Anggraeni, E. (2022). Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Dadang Solihin, S. E. (2021). *Administrasi Pembangunan*. Jakad Media Publishing.
- Ellitan, L. (2003). Peran Sumber Daya Dalam Meningkatkan Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(2), 156-170.
- Erlina, E., & Indra, A.P. (2023). Implementasi Penggunaan Teknoligi Dalam Produk Bank Syariah Indonesia Di Era Generasi Anak Muda Di Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Simpang Limun. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*.
- Febiola, V., Iqbal Fasa, M., & Suharto, S. (2023). Analisis Implementasi Green Banking Pada Bank Umum Syariah : Studi Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*.
- Febriyani, D., & Mursidah, I. (2020). Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Tengah Era Digital. *Muamalatuna*, 12(2), 1-14.
- Ginanjar. Kartasasmita. 1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran Dan Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta: Lp3es.
- Hariro, A. Z. Z., Harahap, N. R., Puspitasari, P., Ardiyani, F., Melisa, W., & Juliani, J. (2024). Mengatasi Kesenjangan Digital Dalam Pendidikan: Sosial Dan Bets Practices. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 187-193.
- Indahsari, K., & Listiana, Y. Model Transformasi Digital Untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lokal Partisipatif.
- Indrayani, H. (2012). Penerapan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Efektivitas, Efisiensi Dan Produktivitas Perusahaan. *Jurnal El-Riyasah*, 3(1), 48-56.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147-148.
- Kurniawan, M. R. D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Inovasi Dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 127-133.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013), 3.

- Mardani, D. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media.
- Ngusmanto, H. (2015). *Pemikiran Dan Praktik Administrasi Pembangunan*.
- Putri, N.A., & Ardyansyah, F. (2023). Implementasi Islamic Marketing Mix Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Basuki Rahmat Surabaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
- Sari, D.M., & Anis, M. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam Terhadap Produk-Produk Bank Syariah Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*.
- Savitri, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang Di Era Disrupsi 4.0*. Penerbit Genesis.
- Setiawan, F. (2019). Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke-3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 8(2), 1-11.
- Sugiyono, *Cara Muda Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 09.
- Tulungen, E. E., Saerang, D. P., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital: Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2).
- Wijaya, R.G. (2023). Implementasi Ekonomi Syariah Pada Model Bisnis Aplikasi Go Jek. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*.
- Wulandari, T. H. (2023). *Perlindungan Konsumen Pada Jasa Laundry Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)* (Doctoral Dissertation, Iain Kudus).
- Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008)Hlm 1.